

Analisis Kualitas Teh Perkebunan Rakyat di Kabupaten Batang Berdasarkan Indeks Kualitas dan Persepsi Petani

Fathurrohman¹, Endang Siti Rahayu², Sri Marwanti³

¹²³Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36a Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126, Indonesia.

*Alamat email penulis koresponden: fathursuadim@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Batang merupakan sentra perkebunan teh rakyat terbesar kedua di Jawa Tengah, namun petani hanya menerima harga pucuk Rp1.600–2.000/kg, jauh di bawah harga pokok produksi yang layak. Rendahnya harga ini diduga berkaitan erat dengan kualitas bahan baku yang dihasilkan, namun kondisi aktual kualitas teh rakyat di tingkat tapak belum pernah diukur secara komprehensif dan berbasis persepsi petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting kualitas teh perkebunan rakyat Kabupaten Batang menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan triangulasi kualitatif. Survei dilakukan terhadap 120 petani di Kecamatan Bawang, Blado, dan Reban menggunakan kuesioner tujuh dimensi kualitas berbasis kualitas Garvin dan Standar Teh Indonesia CERTEAFIED, yang dikonversi menjadi indeks. Wawancara mendalam terhadap 10 informan kunci dilakukan untuk memverifikasi dan memperdalam temuan survei. Hasil menunjukkan grand indeks kualitas sebesar 56,17 (cukup baik), namun temuan ini menyimpan paradoks yakni nilai tersebut lebih ditopang oleh tingginya kemudahan penjualan kepada pengepul, bukan oleh kualitas petikan yang sesungguhnya. Sebesar 86,7% petani tidak menerapkan standar petikan P+2 dan empat dari tujuh dimensi berkategori kurang baik. Mayoritas petani memaknai kualitas sebatas penerimaan pengepul tunggal, sementara pengepul tidak membedakan harga berdasarkan mutu. Hal ini menciptakan perangkap kualitas struktural yang menghambat perbaikan mutu secara berkelanjutan. Kondisi ini berkontribusi langsung pada rendahnya pendapatan petani dan ancaman alih fungsi lahan. Diperlukan sistem insentif harga berbasis kualitas dan penguatan kelembagaan kolektif sebagai solusi struktural.

Kata Kunci: harga teh, kualitas teh, perkebunan, petani, teh rakyat

1. PENDAHULUAN

Teh (*Camellia sinensis*) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang paling banyak dikonsumsi di dunia dan memiliki peran penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia tercatat sebagai produsen teh terbesar ketujuh di dunia dengan luas areal mencapai 107.905 hektare (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020). Di antara provinsi penghasil teh di Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati posisi sebagai penghasil teh terbesar kedua setelah Jawa Barat. Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Batang menjadi salah satu sentra penting perkebunan teh rakyat di Jawa Tengah dan menempati urutan kedua setelah Kabupaten Banjarnegara (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2024).

Kabupaten Batang memiliki luas lahan perkebunan teh rakyat sebesar 1.226,22 hektare dengan total produksi 14.454,93 kuintal per tahun yang tersebar di Kecamatan Bawang, Reban, Blado, Bandar, dan Wonotunggal (BPS Kabupaten Batang, 2023). Kontribusi ini mencapai sekitar 28,85 persen dari total luas perkebunan teh rakyat di Jawa Tengah. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, produktivitas teh rakyat Kabupaten Batang hanya mencapai 0,99 ton per hektar, lebih rendah dibandingkan Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 1,72 ton per hektare dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 1,11 ton per hektare (BPS Kabupaten Batang, 2023).

Kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya harga pucuk teh basah yang diterima petani, hanya berkisar Rp1.600–Rp2.000 per kilogram, di bawah rata-rata nasional sebesar Rp2.300 per kilogram

dan jauh di bawah harga ideal Rp3.050 per kilogram agar petani mendapatkan keuntungan minimal 15% (Business Watch Indonesia, 2021; APTEHINDO, 2022). Struktur pasar yang menempatkan petani dalam ketergantungan tinggi terhadap PBN dan PBS menyebabkan lemahnya posisi tawar petani. Salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi harga dan daya saing produk teh adalah kualitas bahan baku, yaitu pucuk teh yang dihasilkan petani.

Kualitas teh dipahami secara multidimensional berdasarkan kerangka Garvin (1984) yang mencakup *performance*, *conformance*, *reliability*, *aesthetics*, dan *perceived quality*. Dalam konteks perkebunan teh, kerangka ini dikombinasikan dengan Standar Teh Indonesia (STI) CERTEAFIED yang dikembangkan Dewan Teh Indonesia (2024) sebagai acuan mutu nasional. STI memandang kualitas teh tidak hanya sebagai karakteristik fisik produk akhir, tetapi sebagai hasil dari rangkaian proses mencakup kualitas bahan baku, praktik budidaya, penanganan pascapanen, konsistensi standar operasional, hingga aspek keberlanjutan usaha.

Penelitian tentang kualitas teh rakyat di Indonesia masih terbatas. Dewi dan Purwono (2019) mengkaji mutu petik teh di Kebun Bedakah, Wonosobo, menggunakan analisis petik dan analisis pucuk. Neilson et al. (2006) menegaskan bahwa kualitas teh dari petani rakyat (*smallholder*) secara umum lebih rendah dibandingkan teh dari perkebunan besar. Owuor dan Obanda (1998) membuktikan bahwa standar petikan kasar secara langsung menurunkan kualitas kimia teh, termasuk kadar theaflavin, kecerahan, dan evaluasi sensoris. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan tujuh dimensi kualitas teh perkebunan rakyat ke dalam satu instrumen indeks berbasis persepsi petani di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting kualitas teh perkebunan rakyat di Kabupaten Batang menggunakan pendekatan indeks kualitas berbasis persepsi petani yang mencakup tujuh dimensi: standar petikan, konsistensi mutu, penanganan pascapanen, persepsi penerimaan pasar, keberlanjutan mutu, pemeriksaan kualitas, dan keberlanjutan usaha. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi aktual kualitas teh rakyat sebagai dasar perumusan strategi peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan agribisnis teh rakyat di Kabupaten Batang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada tiga kecamatan sentra perkebunan teh rakyat, yaitu Kecamatan Bawang, Reban, dan Blado. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive mengingat ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan luasan perkebunan teh rakyat terbesar dan merupakan area plasma dalam skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026.

Populasi penelitian adalah seluruh petani teh perkebunan rakyat di tiga kecamatan penelitian yang berjumlah 2.255 orang berdasarkan data dari PBS. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 90% (tingkat kesalahan 10%), sehingga diperoleh jumlah sampel minimal 96 orang. Jumlah ini kemudian dibulatkan dan ditambahkan 20% sebagai cadangan, menjadi 120 responden. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *proporsional random sampling* berdasarkan jumlah petani teh rakyat di masing-masing desa.

Tabel 1. Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian Per Kecamatan

Kecamatan	Populasi (Orang)	Jumlah Sampel
Bawang	1.224	55
Blado	213	22
Reban	818	43
Total	2.225	120

Data primer diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur kepada 120 petani teh rakyat untuk memperoleh gambaran mengenai standar petikan, komposisi pucuk, konsistensi praktik produksi, serta penerimaan pasar. Data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Batang, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, serta literatur terkait agribisnis dan kualitas teh.

Pengukuran kualitas teh perkebunan rakyat dilakukan menggunakan instrumen kuesioner berbasis skala Likert (1–5) yang mencakup tujuh dimensi kualitas: (1) standar petikan, (2) konsistensi mutu, (3) penanganan pascapanen, (4) persepsi penerimaan pasar, (5) keberlanjutan mutu, (6)

pemeriksaan kualitas, dan (7) keberlanjutan usaha. Dimensi-dimensi ini disusun berdasarkan kombinasi kerangka kualitas multidimensional Garvin (1984) dan Standar Teh Indonesia (STI) CERTEAFIED Dewan Teh Indonesia (2024).

Skor Likert kemudian dikonversi menjadi indeks kualitas menggunakan rumus normalisasi Min-Max:

$$\text{Indeks} = (X - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Keterangan: X = total skor aktual dimensi; X_{min} = skor minimum teoritis (1); X_{max} = skor maksimum teoritis (5). Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, yang kemudian dikalikan 100 untuk menyatakan dalam skala 0–100.

Kategori indeks kualitas ditetapkan sebagai berikut: 40 < tidak baik (TB); 40 – 54,99 = kurang baik (KB); 55–69,99 = cukup baik (CB); 70–84,99 = baik (B); >85 = sangat baik (SB). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan kondisi kualitas pada masing-masing dimensi dan secara agregat (grand indeks).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Umum Perkebunan Teh Rakyat Kabupaten Batang

Kabupaten Batang memiliki perkebunan teh rakyat yang tersebar di lereng Gunung Prau dan Gunung Kamulan pada ketinggian 537–800 mdpl. Berdasarkan data BPS tahun 2023, total luas areal teh rakyat mencapai 1.226,22 hektare dengan produksi 14.454,93 kuintal per tahun. Produksi terbesar berasal dari Kecamatan Reban (6.993,25 kw) diikuti Bawang (4.675,78 kw), Blado (1.686,75 kw), Bandar (648,50 kw), dan Wonotunggal (450,65 kw).

Perkebunan teh rakyat di Kabupaten Batang sebagian besar beroperasi dalam skema kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan PBS sebagai perusahaan inti. Melalui skema ini, petani teh rakyat perkebunan plasma terintegrasi ke dalam sistem produksi dan pemasaran yang dikelola oleh perusahaan inti. Namun sebagaimana kajian Perwitasari et al. (2021) dan Barik et al. (2025), kemitraan ini sering menciptakan relasi yang tidak seimbang di mana perusahaan memiliki kendali dominan terhadap harga, standar kualitas, dan mekanisme pembayaran.

3.2 Profil Indeks Kualitas Teh Perkebunan Rakyat

Hasil pengukuran indeks kualitas teh perkebunan rakyat Kabupaten Batang menggunakan tujuh dimensi menunjukkan grand indeks sebesar 56,17 yang termasuk dalam kategori cukup baik (55–69,99). Profil lengkap per dimensi disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indeks Kualitas Perkebunan Teh Rakyat Kabupaten Batang

No	Dimensi Kualitas	Indeks	Kategori
1	Standar Petikan	52,50	Kurang baik
2	Konsistensi Mutu	54,58	Kurang baik
3	Penanganan Pascapanen	69,55	Cukup baik
4	Persepsi Penerimaan Pasar	60,68	Cukup baik
5	Keberlanjutan Mutu	56,51	Cukup baik
6	Pemeriksaan Kualitas	51,77	Kurang baik
7	Keberlanjutan Usaha	47,60	Kurang baik
Grand Indeks		56,17	Cukup Baik

Grand indeks 56,17 berada dalam kategori cukup baik, namun profil ini perlu dipahami secara kritis. Pola yang ditemukan menunjukkan bahwa dimensi yang bersifat teknis-prosedural cenderung rendah (standar petikan, konsistensi mutu, pemeriksaan kualitas), sementara dimensi yang berkaitan dengan penerimaan pasar dan penanganan pascapanen lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa petani lebih berorientasi pada kemudahan penjualan daripada peningkatan standar teknis produksi.

3.3 Standar Petikan: Kepatuhan terhadap Standar Industri

Dimensi standar petikan menghasilkan indeks 52,50 yang masuk kategori kurang baik, sekaligus menjadi salah satu dari empat dimensi berkategori kurang baik dalam penelitian ini. Sebesar 86,7% petani tidak menerapkan standar petikan P+2 (pucuk dan dua daun muda) secara konsisten. Sebanyak 66,7% petani menggunakan petikan kasar, dan hanya 10% yang menggunakan petikan medium. Persentase pucuk memenuhi syarat (PMS) hanya berkisar 10–20%, jauh di bawah standar minimal 50% yang ditetapkan industri (Dewi dan Purwono, 2019). Rekap masing-masing indikator tersaji pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Indeks Dimensi Standar Petikan

No	Indikator	STS	TS	CS	S	SS	Total	Indeks	Kategori
1	Pemetikan standar P+2	0	104	13	3	0	259	28,96	TB
2	Pemetikan selektif sesuai kematangan pucuk	0	10	52	56	2	410	60,42	CB
3	Pucuk yang dipanen bersih dari daun tua/tangkai kasar	0	16	55	48	1	394	57,08	CB
4	Hasil panen jarang tercampur bahan asing	0	0	65	45	10	425	63,54	CB
Rata-rata Indeks								52,50	KB

Kondisi ini berbanding lurus dengan temuan ilmiah internasional. Owuor dan Obanda (1998) membuktikan bahwa standar petikan kasar menurunkan kadar katekin, theaflavin, kecerahan, dan evaluasi sensoris teh hitam. Aaqil et al. (2023) menegaskan bahwa standar petikan dua daun dan pucuk merupakan kompromi ideal antara produktivitas dan kualitas. Petikan kasar meningkatkan serat kasar dan thearubigin sementara menurunkan total padatan terlarut, kafein, dan theaflavin yakni senyawa yang menentukan kualitas teh hitam secara kimiawi.

Rendahnya kepatuhan terhadap standar petikan tidak semata mencerminkan ketidakmampuan teknis petani, melainkan lebih pada absennya insentif ekonomi yang mendorong peningkatan standar. Temuan ini selaras dengan kajian Neilson et al. (2006) di India Selatan bahwa sistem pasar yang tidak memberikan insentif harga berbasis kualitas menjadi akar dari rendahnya standar petikan di tingkat petani rakyat. Secara khusus, 88% petani responden hanya bergantung pada satu pengepul yang tidak membedakan harga berdasarkan kualitas petikan, sehingga *perceived conformance* petani pun cukup rendah dari segi standar industri.

3.4 Konsistensi Mutu: Tantangan Insentif dan Pembiayaan

Dimensi konsistensi mutu menghasilkan indeks 54,58 yang masuk kategori kurang baik. Sebanyak 27,5% petani mengakui penurunan mutu sering terjadi, dan hanya 32,5% yang melakukan pemeriksaan kualitas secara mandiri. Inkonsistensi ini bukan semata soal kemampuan teknis, melainkan lebih pada ketiadaan insentif ekonomi dan keterbatasan pembiayaan yang mendukung konsistensi perawatan kebun. Hasil rekap indikator dimensi konsistensi mutu sesuai Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Indeks Dimensi Konsistensi Mutu

No	Indikator	STS	TS	CS	S	SS	Total	Indeks	Kategori
1	Kualitas pucuk relatif stabil setiap musim	0	25	43	51	1	388	55,83	CB
2	Hasil panen jarang terjadi penurunan mutu signifikan	0	33	64	22	1	351	48,13	KB
3	Saya menerapkan budidaya yang konsisten	0	18	60	42	0	384	55,00	CB
4	Pembeli jarang mengeluhkan kualitas panen saya	0	11	53	56	0	405	59,38	CB
Rata-rata Indeks								54,58	KB

Faktor yang memperburuk kondisi ini adalah pencabutan subsidi pupuk pada tahun 2022 yang langsung melemahkan kemampuan petani dalam menjaga konsistensi pemupukan. Tanpa pemupukan yang teratur, pertumbuhan pucuk melambat dan giril petik melebar hingga lebih dari dua bulan dari standar dua minggu, yang pada gilirannya menurunkan komposisi pucuk muda yang memenuhi syarat olah. Mose et al. (2015) di Kenya menemukan bahwa inovasi kelembagaan berupa sistem tata kelola partisipatif dan layanan pendampingan teknis yang responsif terbukti menjadi insentif bagi petani rakyat untuk menghasilkan teh berkualitas tinggi. Temuan ini mengisyaratkan bahwa solusi inkonsistensi mutu di Kabupaten Batang membutuhkan pendekatan kelembagaan, bukan sekadar intervensi teknis.

3.5 Penanganan Pascapanen: Dimensi Tertinggi dengan Praktik Bermasalah

Dimensi penanganan pascapanen menghasilkan indeks 69,55, merupakan nilai tertinggi di antara semua dimensi dan masuk kategori cukup baik. Rekap dari indeks dimensi penanganan pasca panen tersaji pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Indeks Dimensi Penanganan Paska Panen

No	Indikator	STS	TS	CS	S	SS	Total	Indeks	Kategori
1	Pucuk segera dikirim setelah dipetik	0	1	16	71	32	494	77,92	B
2	Pucuk tidak ditumpuk lama sebelum dijual	2	7	34	47	30	456	70,00	B
3	Pengangkutan dilakukan dengan cara menjaga kualitas pucuk	0	0	50	61	7	429	65,89	CB
4	Pucuk dikemas sesuai dengan standar pembeli	0	1	52	64	3	429	64,83	B
Rata-rata Indeks								69,55	CB

Indeks persepsi penerimaan pasar (60,68) dan keberlanjutan mutu (56,51), ketiga dimensi ini masuk kategori cukup baik, sementara empat dimensi lainnya berkategori kurang baik. Indikator kecepatan pengiriman pucuk mendapat nilai tinggi, mencerminkan kesadaran petani yang cukup baik tentang pentingnya menjaga kesegaran pucuk teh. Petani umumnya memahami bahwa pucuk yang tidak segera dikirimkan akan menurunkan kualitas dan berpotensi ditolak pengepul.

Meski demikian, terdapat indikator penanganan pascapanen yang bermasalah, yaitu praktik gelonggong air (menambahkan air ke pucuk untuk menambah berat) dan penumpukan pucuk semalam sebelum pengiriman. Praktik gelonggong air masih dilakukan sebagai cara meningkatkan berat pucuk demi mendapatkan pendapatan lebih. Kedua praktik ini secara langsung menurunkan kualitas kimiawi dan fisik pucuk sebelum masuk ke pabrik pengolahan, dan menjadi salah satu alasan perusahaan swasta menanggukkan penyerapan teh rakyat pada periode tertentu.

3.6 Persepsi Penerimaan Pasar: Kontradiksi antara Kemudahan Jual dan Ketidaksesuaian Harga

Dimensi persepsi penerimaan pasar menghasilkan indeks 60,68 yang masuk kategori cukup baik, namun menyimpan kontradiksi mencolok. Kemudahan penjualan mendapat skor tinggi karena pengepul menerima semua grade petikan tanpa membedakan kualitas, sementara kesesuaian harga dengan kualitas mendapat skor jauh lebih rendah. Kontradiksi ini mencerminkan kondisi di mana petani dengan mudah menjual produknya namun tidak mendapatkan harga yang mencerminkan kualitas yang dihasilkan. Rekapitulasi dari indikator penerimaan pasar tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Indeks Dimensi Penerimaan Pasar

No	Indikator	STS	TS	CS	S	SS	Total	Indeks	Kategori
1	Hasil panen saya mudah diterima oleh pembeli	0	0	23	95	2	459	70,63	B
2	Harga yang diterima pembeli mencerminkan kualitas teh saya	0	60	19	40	1	342	46,25	KB
3	Kualitas teh saya mampu bersaing dengan petani lain	0	8	52	58	2	414	61,25	CB
4	Kualitas teh saya memenuhi standar pembeli utama	0	1	49	69	1	430	64,58	CB
Rata-rata Indeks								60,68	CB

Garvin (1984) menjelaskan bahwa *perceived quality* sangat dipengaruhi oleh mekanisme pemberian sinyal di pasar. Ketika 88% petani bergantung pada satu pengepul yang tidak membedakan harga berdasarkan kualitas, sinyal pasar yang mendorong peningkatan mutu hilang sepenuhnya. Harga pucuk teh yang diterima petani berkisar Rp 1.800–2.000/kg, jauh di bawah HPP Rp3.000/kg. Kondisi ini menciptakan perangkap kualitas yakni petani tidak memiliki insentif untuk meningkatkan standar petikan karena harga yang diterima tidak berbeda antara *grade* kasar dan premium di jalur konvensional.

3.7 Keberlanjutan: Dimensi Paling Kritis

Keberlanjutan mutu menghasilkan indeks 56,51 yang masuk kategori cukup baik, sementara keberlanjutan usaha mencatat indeks 47,60 yang masuk kategori kurang baik sehingga menjadikannya dimensi dengan nilai terendah dalam penelitian ini. Meskipun keberlanjutan mutu berada di kategori cukup baik, kondisinya tetap rentan. Dampaknya perawatan kebun hanya dilakukan saat ada dana, gilir petik melebar dari standar dua minggu menjadi lebih dari dua bulan, dan penerapan standar tidak stabil antar musim panen. Rekapitulasi indikator keberlanjutan mutu tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Indeks Dimensi Keberlanjutan Mutu

No	Indikator	STS	TS	CS	S	SS	Total	Indeks	Kategori
1	Tanaman teh saya masih produktif dan sehat	0	16	37	63	4	415	61,46	CB
2	Saya melakukan pemupukan dan pemangkasan rutin	0	27	49	40	4	381	54,38	KB
3	Praktik budidaya saya mendukung kualitas jangka panjang	0	24	51	44	1	382	54,58	KB
4	Praktik budidaya mendukung keberlanjutan lingkungan	0	9	75	36	0	387	55,63	CB
Rata-rata Indeks								56,51	CB

Keberlanjutan usaha yang rendah tercermin dari tren alih fungsi lahan teh rakyat yang terus berlangsung. Data menunjukkan penurunan luasan lahan dari 1.200 hektare pada tahun 2024 menjadi sekitar 1.050 hektare setara dengan penurunan 150 hektare dalam satu tahun. Petani yang tidak

mendapatkan pendapatan yang layak mulai beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan seperti kopi, durian dan pisang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kualitas teh rakyat telah memasuki fase yang lebih serius, yaitu ancaman terhadap keberlanjutan usaha perkebunan teh rakyat itu sendiri (Tanuputri dan Bai, 2023). Rekap indikator-indikator dari keberlanjutan usaha tersaji pada Table 8 dibawah ini.

Tabel 8. Indeks Dimensi Keberlanjutan Usaha

No	Indikator	STS	TS	CS	S	SS	Total	Indeks	Kategori
1	Harga dari pembeli cukup untuk pemeliharaan kebun	1	61	30	28	0	325	42,71	KB
2	Harga dari pembeli cukup untuk pengupahan pekerja	16	41	40	23	0	310	39,58	TB
3	Pembeli selalu membayar tepat waktu	2	5	50	62	1	415	61,46	CB
4	Pembeli memberi masukan standar kualitas pasar	0	7	74	39	0	392	56,67	CB
5	Saya tidak berniat konversi lahan kebun jadi usaha lain	4	34	37	39	6	369	51,88	KB
6	Keturunan memandang usaha perkebunan teh menjanjikan	0	35	57	22	6	359	49,79	KB
7	Keluarga berniat melanjutkan usaha perkebunan saya	0	27	62	25	6	370	52,08	KB
8	Pemda memberi bimbingan teknis kebun berkelanjutan	14	91	10	3	2	248	26,67	TB
Rata-rata Indeks								47,60	KB

Kondisi keberlanjutan yang rentan ini tidak lepas dari dua kekosongan struktural yang dirasakan langsung oleh petani. Pertama, minimnya bimbingan teknis yang berkelanjutan dalam hal pemeliharaan dan perawatan kebun. Petani sebagian besar mengandalkan pengetahuan turun-temurun tanpa pembaruan praktik budidaya yang terstruktur, sehingga ketika kondisi ekonomi memburuk, perawatan kebun menjadi hal pertama yang dikurangi. Kedua, tidak adanya perlindungan regulasi harga di tingkat petani menyebabkan harga pucuk sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pengepul-pabrik tanpa ruang negosiasi bagi petani. Kedua kondisi ini saling memperlemah, dampaknya, tanpa bimbingan teknis yang memadai kualitas sulit meningkat, dan tanpa kepastian harga yang adil tidak ada insentif bagi petani untuk berinvestasi dalam perawatan kebun secara berkelanjutan.

3.8 Pemeriksaan Kualitas: Absennya Mekanisme Quality Control

Dimensi pemeriksaan kualitas menghasilkan indeks 51,77 yang masuk kategori kurang baik, mencerminkan hampir tidak adanya mekanisme *quality control* (QC) yang terstandar di sisi petani maupun pembeli konvensional yakni pengepul. Sebagian besar petani tidak melakukan pemeriksaan kualitas secara mandiri sebelum pengiriman. Tidak ada standar pemeriksaan yang disepakati antara petani dan pengepul, dan seluruh keputusan penerimaan diserahkan kepada pengepul tanpa kriteria yang terukur dan transparan. Rekap indikator-indikator dimensi pemeriksaan kualitas disajikan pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Indeks Dimensi Pemeriksaan Kualitas

No	Indikator	STS	TS	CS	S	SS	Total	Indeks	Kategori
1	Petani bertanggung jawab mengecek rutin kualitas fisik & grade hasil kebun	0	32	46	42	0	370	52,08	KB
2	Pembeli bertanggung jawab mengecek rutin kualitas fisik, kimia & grade hasil kebun	2	36	53	29	0	349	47,71	KB
3	Parameter fisik kelembutan & keseragaman ukuran sesuai standar pembeli (ISO 1573)	0	30	61	29	0	359	49,79	KB
4	Parameter fisik kematangan hasil kebun sesuai standar pembeli (ISO 1573)	0	7	70	43	0	396	57,50	CB
5	Parameter fisik kebersihan hasil kebun sesuai standar pembeli (ISO 1573)	0	6	67	45	2	403	58,96	CB
6	Parameter pestisida kebun sesuai standar pembeli	0	20	61	39	0	379	53,96	KB
7	Grade pucuk sesuai standar pembeli (ISO 3103:2019)	1	79	32	8	0	287	34,79	TB
Rata-rata Indeks								51,77	KB

Kondisi ini berbeda tajam dengan negara-negara produsen teh utama seperti Sri Lanka, India, China, dan Jepang yang telah menetapkan P+2 sebagai standar minimum mengikat secara hukum. Di Indonesia, meskipun panduan teknis dari Kementerian Pertanian sudah tersedia, tidak ada mekanisme pasar maupun sanksi regulatoris yang mendorong kepatuhan. Dewan Teh Indonesia mengungkapkan bahwa tidak ada regulasi mutu petik yang berlaku secara hukum di Indonesia, kondisi yang menjadi salah satu akar masalah rendahnya kualitas teh rakyat nasional.

3.9 Implikasi terhadap Nilai Tambah dan Keberlanjutan Petani Teh Kabupaten Batang

Secara keseluruhan, grand indeks kualitas 56,17 (cukup baik) tidak menghasilkan harga yang memadai bagi petani. Sebagian besar petani hanya menerima Rp1.800–2.000/kg, jauh di bawah HPP Rp 3.000/kg. Ini merupakan manifestasi nyata dari ketidakseimbangan subsistem yang digambarkan Suprihatini (2016) yakni petani menghasilkan bahan baku yang tidak bisa dikonversi menjadi nilai ekonomi layak karena tidak terlibat dalam subsistem hilir dan tidak mendapatkan insentif harga berbasis kualitas.

Kondisi ini juga terdokumentasi dalam penelitian Doorneweert et al. (2012) yang menemukan bahwa petani rakyat di Indonesia hanya menerima sekitar 15,8% dari harga konsumen akhir. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi pola tersebut masih berlanjut di Kabupaten Batang pada tahun 2024. Relasi antara petani dan pengepul-pabrik mencerminkan apa yang disebut Palat dan Palatova (2023) serta Barik et al. (2025) sebagai relasi principal-agent yang asimetris. Hal ini berarti perusahaan memiliki kendali lebih besar atas standar kualitas dan harga, sementara petani menanggung sebagian besar risiko produksi.

Meskipun tidak ada petani yang menerapkan standar P+2 secara konsisten, terdapat bukti lapangan yang menjanjikan. Petani pengolah mandiri di Kecamatan Bawang yang menerapkan standar bahan baku lebih tinggi dan melakukan pengolahan sederhana (sangrai manual, penggulungan tangan) berhasil menjual produk seharga Rp 75.000/kg dari bahan baku Rp 1.700/kg

membuktikan bahwa potensi product upgrading sangat besar apabila terdapat mekanisme kelembagaan yang mendukung.

4. KESIMPULAN

Kualitas teh perkebunan rakyat Kabupaten Batang secara keseluruhan berada pada kategori cukup baik dengan grand indeks 56,17 dari skala 100. Kondisi ini dapat dipahami sebagai refleksi dari sistem agribisnis yang tidak memberikan insentif harga berbasis kualitas. Petani memaknai kualitas sebatas penerimaan pengepul, bukan sebagai standar teknis industri. Sebesar 86,7% petani tidak menerapkan standar petikan P+2, dan PMS hanya 10–20% jauh di bawah ambang minimal 50%. Empat dimensi berada pada kategori kurang baik yakni standar petikan (52,50), konsistensi mutu (54,58), pemeriksaan kualitas (51,77), dan keberlanjutan usaha (47,60). Sementara itu penanganan pascapanen (69,55) menjadi dimensi dengan nilai tertinggi dalam kategori cukup baik.

Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap rendahnya harga yang diterima petani (Rp 1.800–2.000/kg, di bawah HPP Rp 3.000/kg) dan pada gilirannya mengancam keberlanjutan perkebunan teh rakyat, terbukti dari penurunan luasan lahan sekitar 150 hektar dalam satu tahun terakhir. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas petani dalam penerapan standar petikan P+2, penguatan mekanisme *quality control* di tingkat pengepul dan koperasi, serta pembangunan sistem insentif harga berbasis kualitas yang transparan untuk mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani teh perkebunan rakyat di Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi responden penelitian ini, serta kepada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTEHINDO) Jawa Tengah dan Kabupaten Batang, atas dukungan data dan akses lapangan, UMKM teh, Dewan Teh Indonesia (*Indonsian tea Board*). Penelitian ini didukung oleh Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaqil, M., Dong, H., Ali, I., & Dong, Y. (2023). Harvesting Standards and Processing Techniques of Black Tea: A Comprehensive Review. *Foods*, 12(4), 1–20. APTEHINDO. (2022). Data Harga Pucuk Teh Tingkat Petani. Asosiasi Petani Teh Indonesia.
- Barik, P., Bedamatta, R., & Vikraman, S. (2025). Smallholders in contract farming value chain: Challenges and opportunities. *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 37(4), 604–636.
- BPS Kabupaten Batang. (2023). Kabupaten Batang Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2023). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023.
- Badan Pusat Statistik. Business Watch Indonesia. (2021). Kajian Harga Ideal Pucuk Teh di Tingkat Petani. BWI.
- Dewan Teh Indonesia. (2024). Standar Teh Indonesia “CERTEAFIED” Versi 1.0 2024.
- Dewi, S., & Purwono. (2019). Mutu Petik Teh (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze) di Kebun Bedakah, Wonosobo, Jawa Tengah. *Buletin Agrohorti*, 7(3), 337–342.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020). Roadmap Teh 2020–2045. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Doorneweert, B., Ruben, R., & Dijk, G. Van. (2012). Certification in Tea: Business Models for Smallholder Integration. LEI Wageningen UR.
- Garvin, D. A. (1984). What Does “Product Quality” Really Mean? *MIT Sloan Management Review*, 26.
- Mose, J. M., Mbeche, R. F., & Ateka, J. (2015). Institutional innovations in smallholder tea cooperatives in Kenya. *African Journal of Agricultural Research*, 10(22), 2256–2267.
- Neilson, J., Pritchard, B., & Spriggs, J. (2006). Institutional arrangements and supply chain governance in the Indian tea sector. *Journal of Rural Studies*, 22(3), 301–315.
- Owuor, P. O., & Obanda, M. (1998). Influence of plucking standards on the quality and yield of black tea. *Tropical Science*, 38(1), 1–9.
- Palat, R., & Palatova, P. (2023). Contract farming and asymmetric power: lessons from the tea sector. *Agricultural Systems*, 210, 103720.
- Perwitasari, H., Mulyo, J. H., & Waluyati, L. R. (2021). Keberlanjutan Kemitraan Petani Plasma Teh dan PT Pagilaran: Bagaimana dan Apa yang Mempengaruhi? *Agro Ekonomi*, 32(1), 15–30.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2024). Data Statistik Perkebunan Indonesia. Kementerian Pertanian.
- Suprihatini, R. (2016). Smallholder tea farmers in Indonesia: supply chain and value chain analysis. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 6(2), 129–145.
- Tanuputri, M. A., & Bai, X. (2023). A Framework to Build A Resilient Supply Chain: A Case Study of Javanese Tea in Indonesia. *Sustainable Production and Consumption*, 35, 256–270.